

FUNGSI KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN DALAM LEMBAGA LEGISLATIF

Desi Rani Putri

Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas

Email: desi12raniputri@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang kepemimpinan perempuan khususnya di dalam lembaga legislatif. Saat ini dalam lembaga legislatif baik di tingkat pusat maupun lokal perempuan masih menjadi minoritas, meskipun sudah ada *affirmative action* yang bertujuan untuk meningkat jumlah perempuan dalam lembaga legislatif. Selain itu perempuan yang berhasil mendapatkan kursi di lembaga legislatif jarang mendapatkan posisi yang tinggi. Hal ini tentu disebabkan kurang percayanya masyarakat terhadap kemampuan perempuan dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dan menganggap politik adalah domainnya laki-laki. Artikel ini menggunakan teori kepemimpinan politik perempuan dengan metode kualitatif dan teknis studi kasus untuk menganalisis dan menjelaskan kemampuan perempuan di dalam lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi kepemimpinan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang berada dalam lembaga legislatif mampu menjalankan fungsi kepemimpinan, namun hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor sehingga mendorong perempuan bisa menjalankan fungsi kepemimpinannya. Terdapat tiga faktor yang memengaruhi kepemimpinan perempuan pertama yaitu, pengalaman yang dimiliki oleh perempuan. Kedua rekan kerja dalam lembaga yang sudah berpengalaman. Ketiga, situasi fisik maupun situasi sosial yang mendukung. Seperti lingkungan sosial bersifat homogen dalam hal agama, budaya maupun ras sehingga mempercepat proses pembangunan. Selain itu rekan kerja di luar lembaga yaitupihak eksekutif memiliki visi dan misi yang sama.

Kata Kunci: kepemimpinan ; perempuan ; legislatif.

Abstract

This paper examines women's leadership, especially in the legislature. Currently, in legislative institutions, both at the central and local levels, women are still a minority, although there have been affirmative actions aimed at increasing the number of women in the legislature. In addition, women who manage to get seats in the legislature rarely get high positions. This is certainly due to the lack of public trust in the ability of women to carry out leadership functions and considers politics to be the domain of men. This article uses the theory of women's political leadership with qualitative methods and technical case studies to analyze and explain the ability of women in the legislature to carry out the leadership function. The results of the study show that women who are in the legislature are able to carry out leadership functions, but this is influenced by several factors that encourage women to carry out their leadership functions. There are three factors that influence women's leadership, namely, the experience possessed by women. Both colleagues in institutions who are experienced. Third, physical situations and social situations that support. For example, the social environment is homogeneous in terms of religion, culture and race, thus accelerating the development process. In addition, colleagues outside the institution, namely the executive, have the same vision and mission.

Keywords : leadership ; woman ; legislative.

1. PENDAHULUAN

Minoritasnya kepemimpinan perempuan dalam lembaga legislatif masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan meskipun sudah ada *Affirmative Action*. Posisi perempuan yang minoritas dalam lembaga legislatif tentu akan mengakibatkan bias gender yang dapat berdampak dalam proses pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak menguntungkan perempuan atau tidak memenuhi kebutuhan perempuan. Kemudian perempuan yang menjadi bagian kecil minoritas dari kelompok yang didominasi oleh laki-laki akan dilihat sebagai simbol yang mewakili semua perempuan. Sehingga hal ini akan memberikan tekanan besar bagi perempuan tersebut, karena hasil kinerja perempuan tersebut akan terlihat jelas dan ditambah perempuan tersebut dilihat dari stereotip gender.¹

Perlu disadari bahwa keterwakilan perempuan di parlemen dinilai penting. Menurut Azza Karam dan Joni Lovenduski meyakinkan bahwa perempuan yang berada di parlemen akan melakukan perubahan dalam empat bidang, meliputi institusional/prosedural, representasi, pengaruh terhadap *output* dan diskursus. Hal ini telah dibuktikan di Negara Swedia, dimana kehadiran perempuan di parlemen telah membawa perubahan kepada institusi yang lebih menjadi sensitif terhadap gender. Namun disayangkan di Indonesia jumlah keterwakilan perempuan di parlemen masih sedikit, karena perempuan menganggap politik adalah domainnya laki-laki.²

Berbicara mengenai keterwakilan terdapat beberapa jenis keterwakilan yaitu pertama, keterwakilan formal yang memiliki fokus di tataran aturan hukum prosedur bagaimana wakil dipilih atau diganti. Kedua, keterwakilan deskriptif yang diartikan dengan keterwakilan yang secara komposisi proporsional antara yang mewakili dan diwakili. Ketiga keterwakilan substantif atau responsif, dimana orang menjadi wakil harus bertindak dan harus memperjuangkan orang yang mereka wakili. Terakhir keterwakilan simbolis seperti bendera yang merupakan simbol suatu bangsa.³

Permasalahan selanjutnya selain perempuan menjadi minoritas dalam legislatif, perempuan yang terpilih jarang mendapatkan posisi yang tinggi di legislatif. Pada hal perempuan memiliki beberapa kelebihan dalam memimpin salah satunya dalam gaya kepemimpinan. Dalam memimpin perempuan memiliki gaya kepemimpinan yang demokratis atau partisipatif dibandingkan laki-laki.⁴ Gaya kepemimpinan demokratis ini tentu sesuai dengan lembaga legislatif yang bersifat kolektif kolegial. Keuntungan

¹Kanter, R. 1977. “*Men and Women Of The Corporation*”. New York :Basic Book

²Budiatri, Aisah Putri. 2011. “Bayang-Bayang Afirmasi Keterwakilan Politik Perempuan di Parlemen Indonesia”.*Jurnal Studi Politik Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia*. 1(2): 97-113.

³Ella Syahputri. 2014. “Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Komparasi Indonesia dan Korea Selatan”.*Indonesian Journal of International Studies (IJIS)*. 1(2): 165-176.

⁴Eagly, A.H. & Carli, L.L. 2003 “The Female Leadership advantage: An Evaluation of the evidence”.*Leadership Quarterly*. 14: 807-834

kepemimpinan perempuan dalam lembaga legislatif juga didukung dalam hasil meta analisis yang membandingkan keefektifan pemimpin laki-laki dengan perempuan. Dalam meta analisis tersebut menjelaskan bahwa perempuan lebih efektif memimpin dibandingkan laki-laki dalam bidang selaras dengan gender seperti layanan-layanan sosial, dan pemerintahan, sedangkan perempuan kurang efektif dibandingkan laki-laki dalam bidang militer. Meskipun perempuan memiliki kelebihan dalam kepemimpinan, pada kenyataannya perempuan sulit untuk menjadi pemimpin.⁵

Pada hal apabila melihat definisi kepemimpinan itu sendiri tidak ada definisi kepemimpinan yang menunjukkan gender. Kepemimpinan menurut Nawawi adalah kemampuan atau kecerdasan mendorong sejumlah orang (dua orang atau lebih) agar bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan bersama.⁶ Apabila kepemimpinan dikaitkan dengan politik, maka kepemimpinan politik adalah kepemimpinan yang berlangsung dalam suprastruktur politik maupun dalam infrastruktur politik.⁷ Berdasarkan konsep kepemimpinan yang telah dijabarkan sebelumnya, tidak ada konsep yang mengatakan bahwa pemimpin adalah laki-laki atau melihat gender.

Salah satu penyebab minoritasnya kepemimpinan perempuan dalam lembaga legislatif yaitu masih adanya budaya patriarki yang berkeyakinan bahwa yang pantas menjadi pemimpin adalah laki-laki.⁸ Hal ini seolah menunjukkan bahwa perempuan tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsi kepemimpinan. Berbicara mengenai fungsi kepemimpinan terdapat lima fungsi kepemimpinan menurut Sondang P Siagian yaitu pertama pimpinan sebagai penentu, untuk mencapai tujuan dari suatu lembaga. Kedua pimpinan sebagai wakil juru bicara untuk menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak. Ketiga pimpinan sebagai komunikator yang efektif. Keempat pimpinan sebagai mediator khususnya dalam penyelesaian konflik. Kelima, pimpinan sebagai integrator karena setiap lembaga memiliki struktur dan spesialisasi kerja.

Namun pada pemilihan umum (pemilu) serentak yang dilaksanakan pada tanggal 17 April tahun 2019 terdapat fenomena yang menarik. Berdasarkan hasil pemilu tahun 2019 di Kota Pariaman hanya satu perempuan yang berhasil mendapatkan kursi di DPRD Kota Pariaman yaitu Fitri Nora yang berasal dari Partai Gerindra. Dalam dua kali periode pemilu legislatif yaitu pada tahun 2014-2019 dan 2019-2024 hanya satu perempuan yang berhasil mendapatkan kursi di DPRD Kota Pariaman dengan perempuan yang sama yaitu Fitri Nora.

⁵ North Peter G. 201., *Kepemimpinan (Teori dan Praktik)*. Jakarta: PT Indeks.

⁶ Pasalong, Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta. hlm 4-5

⁷ R Haris Permana Sugiarto. 2019. "Gaya Kepemimpinan Politik Elly Thrisdayanti Ketua DPRD Kota Padang". *Skripsi*. Padang: FISIP Universitas Andalas.

⁸ Fitriani, Annisa. 2015. "Gaya Kepemimpinan Perempuan". *Jurnal Tapi.*, 11(2): 1-24.

Menariknya Fitri Nora yang merupakan satu-satunya perempuan di DPRD Kota Pariaman, juga menjadi Ketua DPRD Kota Pariaman pada periode 2019-2024. Berdasarkan hasil pemilu tahun 2019, Fitri Nora berhasil mendapatkan suara terbanyak dari 19 anggota DPRD lainnya yaitu sebanyak 1.178 suara. Pada tanggal 14 Agustus 2019 Fitri Nora resmi dilantik menjadi Ketua DPRD Kota Pariaman periode 2019-2024. Maka secara langsung Fitri Nora memimpin 19 anggota DPRD Kota Pariaman lainnya yang semuanya adalah laki-laki.

Melihat keberhasilan Fitri Nora mencapai posisi tertinggi di lembaga legislatif yaitu sebagai Ketua DPRD Kota Pariaman dan satu-satunya perempuan terpilih, maka telah menunjukkan bahwa Fitri Nora mampu menembus langit-langit kaca (*glass ceiling*). Artinya Fitri Nora mampu melewati hambatan yang membuat perempuan sulit untuk bisa menjadi pemimpin. Namun ketika perempuan berhasil menjadi pemimpin dalam suatu lembaga, maka banyak khalayak mempertanyakan kemampuan perempuan tersebut dalam menjalankan kepemimpinan. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas terkait kemampuan perempuan menjalankan fungsi kepemimpinan ketika berada di dalam lembaga legislatif yang bermayoritas laki-laki.

Konsep Kepemimpinan Politik Perempuan

Kepemimpinan politik perempuan yaitu perempuan yang memimpin dalam suprastruktur politik maupun infrastruktur politik. Perempuan memiliki kemampuan dalam memimpin di bidang politik, hal ini didukung dengan kelebihan yang dimiliki oleh perempuan dalam memimpin. Hal ini bisa dilihat dari beberapa temuan para pakar.

Penelitian Rocheel Shape dalam buku yang berjudul *As Leaders, Women Rule Business* yang menjelaskan 27 penelitian tentang isu gender dan kepemimpinan menghasilkan bahwa kepemimpinan perempuan lebih efektif pada sisi tertentu seperti:⁹

- a) Kemampuan memotivasi (dari 5 penelitian terbukti bahwa perempuan lebih baik)
- b) Kemampuan komunikasi (dari 4 penelitian terbukti bahwa perempuan lebih baik)
- c) Kemampuan menciptakan kondisi lingkungan kerja yang positif (dari 5 penelitian terbukti bahwa perempuan lebih baik)
- d) Kemampuan berpikir strategis (dari 2 penelitian terbukti perempuan lebih baik)
- e) Kemampuan mendengarkan keluhan bawahan (dari 2 penelitian terbukti bahwa perempuan lebih baik)
- f) Kemampuan menganalisis isu-isu terkini (dari 2 penelitian terbukti bahwa perempuan lebih baik).

⁹Dian Mayasari. 2016. Pengaruh Kepemimpinan Perempuan Terhadap Kinerja Karyawan di PT AIA Chandra Utama Agency Kupang. *Jurnal AGORA*. 4 (1): 776-781

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan lebih efektif dalam hal kemampuan memotivasi, kemampuan komunikasi, kemampuan menciptakan kondisi lingkungan kerja yang positif, kemampuan berpikir strategis, kemampuan mendengarkan keluhan bawahan, dan kemampuan menganalisis isu-isu terkini. Selain itu juga terdapat lima ciri yang dimiliki oleh perempuan dalam memimpin yaitu:¹⁰

- a) Kemampuan untuk membujuk, perempuan pemimpin umumnya lebih persuasif dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan cenderung berambisi dibandingkan laki-laki.
- b) Membuktikan kritikan yang salah, “belum bermuka tebal”. Perempuan pemimpin memiliki ego yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, artinya mereka lebih merasakan sakit akibat penolakan dan kritikan. Namun perempuan juga memiliki tingkat keberanian, empati, keluwesan, dan keramahan yang tinggi, sehingga perempuan cepat pulih dari rasa sakit, belajar dari kesalahan, dan bersikap positif.
- c) Semangat kerja tim, perempuan pemimpin yang hebat cenderung menerapkan gaya kepemimpinan yang komprehensif saat harus menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Perempuan lebih fleksibel, penuh pertimbangan dan membantu stafnya.
- d) Perempuan pemimpin hebat memiliki kharisma yang kuat, begitu juga dengan laki-laki. Perempuan memiliki gaya persuasif, percaya diri, serta berkemampuan kuat untuk menyelesaikan tugas dan energik
- e) Berani mengambil risiko, tidak lagi berada dalam wilayah aman, pemimpin perempuan berani melanggar aturan dan mengambil risiko.

Menurut Eagly dan Jonson dalam meta analisisnya, menjelaskan terdapat perbedaan yang mencolok antara pemimpin laki-laki dan perempuan, bahwa perempuan memimpin dengan cara lebih demokratis dan partisipatif, dibandingkan laki-laki. Selain itu dalam penjelasan Eagly, Johnnesen dan Van Engen juga menganalisis perbedaan gender dalam kepemimpinan transformasional. Dalam analisis tersebut menemukan bahwa gaya perempuan cenderung lebih transformasional daripada laki-laki. Selain itu perempuan cenderung melakukan imbalan kondisional dibandingkan laki-laki. Apabila membandingkan keefektifan pemimpin laki-laki dan perempuan, maka secara keseluruhan sama-sama merupakan pemimpin yang efektif, tetapi ada perbedaan gender.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi kasus untuk mengidentifikasi fungsi kepemimpinan yang dijalankan oleh Fitri Nora sebagai Ketua DPRD Kota Pariaman di tengah dominasi laki-laki. Selain itu untuk menjelaskan cara Fitri Nora

¹⁰ Annisa Fitriani, *Op.Cit.*, hlm. 1-24.

menjalankan fungsi kepemimpinannya sebagai Ketua DPRD Kota Pariaman di tengah dominasi laki-laki. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *snowball sampling*. Dalam penelitian ini memiliki 13 informan, dengan komposisi 5 orang dari DPRD Kota Pariaman, 2 orang dari staff DPRD Kota Pariaman. Selain itu 3 orang dari eksekutif, 3 orang dari masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan *polling* sederhana.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Minoritasnya keberadaan perempuan di lembaga legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah terus menjadi masalah yang belum terselesaikan, meskipun sudah ada *affirmative action*. Hal ini disebabkan karena masyarakat beranggapan bahwa perempuan tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi kepemimpinan khususnya dalam politik. Sehingga adapun perempuan yang berhasil mendapatkan kursi di legislatif jarang mendapatkan posisi yang penting seperti menjadi menjadi ketua dalam alat kelengkapan dewan (AKD). Namun pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kota Pariaman menghasilkan satu kursi untuk perempuan yaitu Fitri Nora sekaligus sebagai Ketua DPRD Kota Pariaman dan satu-satunya perempuan di DPRD Kota Pariaman. Meskipun Fitri Nora sebagai satu-satunya perempuan di DPRD Kota Pariaman, Fitri Nora dinilai memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsi kepemimpinan.

Kepemimpinan Demokratis Perempuan dalam Lembaga Legislatif

Dalam lembaga legislatif gaya kepemimpinan demokratis merupakan suatu hal keharusan dimiliki oleh pemimpin di lembaga legislatif termaksud Fitri Nora sebagai Ketua DPRD Kota Pariaman. Hal ini dikarenakan lembaga legislatif yang bersifat kolektif kolegial. Maka gaya kepemimpinan demokratis merupakan gaya kepemimpinan yang tepat dan sesuai dalam lembaga legislatif.

Menurut menurut Lippit dan White kepemimpinan yang demokratis yaitu melibatkan anggota organisasi dalam proses mengambil keputusan, yang dirumuskan melalui musyawarah dan diputuskan kelompok, sedangkan pemimpin mendorong.¹¹ Adapun ciri kepemimpinan demokratis menurut Sukanto yaitu pemimpin dan bawahan sama-sama dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Selain itu hubungan dengan bawahan

¹¹Holilah, 2014, "Fungsi dan Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan di Desa Masaran Banyuates Sampang", *Jurnal Review Politik*, 4(1): 119-132.

terjalin dengan baik.¹² Berbicara mengenai gaya kepemimpinan yang demokratis, menurut penelitian Eagly dan Carli yang menjelaskan bahwa perempuan dalam posisi memimpin memiliki kelebihan yaitu perempuan lebih bersifat demokratis dalam memimpin dibandingkan laki-laki.¹³

Apabila ini dikaitkan dengan Fitri Nora sebagai Ketua DPRD Kota Pariaman, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa rekan kerja Fitri Nora, menyatakan Fitri Nora memiliki gaya kepemimpinan demokratis hal ini menandakan Fitri Nora dapat menjalankan fungsinya sebagai penentu arah dalam jalannya rapat. Seperti salah satu pernyataan Evi sebagai Kepala Bagian Persidangan dan Undang-Undang yang mengatakan:¹⁴

“...Ibu Fitri Nora bisa memimpin rapat, suatu rapat dinyatakan berhasil ketika menghasilkan suatu keputusan bersama secara demokratis. Ibu Fitri Nora orangnya percaya diri tinggi dan berani. Contohnya semua anggota dewan laki-laki mampu memimpin, itu contohnya percaya diri dan berani. Setiap rapat terkontrol aman dan lancar, disini anggota dewan saling harga menghargai....”

Pernyataan dari Evi, menjelaskan bahwa Fitri Nora mampu memimpin rapat secara demokratis sehingga menghasilkan suatu keputusan bersama, hal ini didukung oleh sifat yang percaya diri dan berani yang dimiliki oleh Fitri Nora, serta didorong oleh faktor eksternal dimana anggota dewan lainnya yang semuanya adalah laki-laki memiliki sikap yang saling menghargai.

Selain itu untuk melihat gaya kepemimpinan Fitri Nora dan cara Fitri Nora dalam mengambil suatu keputusan, maka dilakukan *polling* sederhana kepada 18 anggota DPRD Kota Pariamandengan hasil dalam diagram berikut.

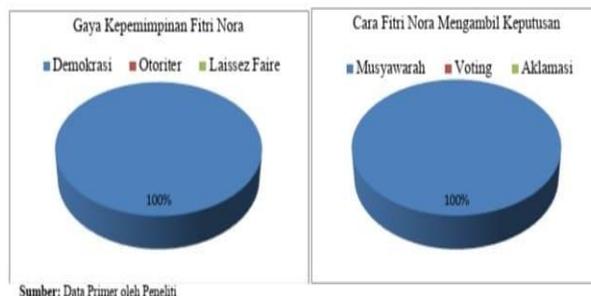


Diagram 1
Gaya Kepemimpinan Fitri Nora dan Cara Fitri Nora Mengambil Keputusan

¹²Marfuah & Ruzikna, 2015, “ Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis Terhadap Loyalitas Karyawan”, JOM FISIP, 2(2): 1-15

¹³North Peter G. 2018. Kepemimpinan (Teori dan Praktik). Jakarta: PT Indeks. Hlm. 333

¹⁴Berdasarkan wawancara peneliti dengan Evi Irma sebagai Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan, di Kantor DPRD Kota Pariaman Jalan Sitimanggopoh, Kecamatan Pariaman Timur, pada tanggal 4 Februari 2021.

Berdasarkan hasil *polling* yang dilakukan terhadap 18 anggota DPRD Kota Pariaman, menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan Fitri Nora adalah demokratis, tentu cara pengambilan keputusan yang sering dilakukan oleh Fitri Nora secara musyawarah. Hal ini tentu sesuai dengan Pasal 95 PP No.12 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa dalam pengambilan keputusan rapat DPRD dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Keberhasilan Fitri Nora memimpin rapat dengan cara musyawarah menunjukkan Fitri memiliki gaya kepemimpinan demokratis dan mampu menjalankan fungsi kepemimpinannya sebagai penentu arah bagi anggota DPRD lainnya, khususnya dalam memimpin rapat. Menurut Sondang P.Siagian salah satu fungsi kepemimpinan sebagai penentu arah yang dapat dilihat dalam bentuk keputusan yang dihasilkan oleh pimpinan, sehingga keputusan yang diambil tersebut dapat menjadi penentu arah bagi bawahannya.¹⁵

Kepemimpinan Perempuan dalam Lembaga Legislatif sebagai Wakil Juru Bicara Masyarakat

Salah satu fungsi kepemimpinan adalah sebagai wakil juru bicara. Menurut Sondang P. Siagian, pimpinan dapat dikatakan sebagai wakil dan juru bicara apabila pimpinan tersebut mampu menjalin hubungan baik dengan pihak di luar lembaga, sehingga dapat mencapai tujuan lembaga. Sondang P. Siagian juga menambahkan bahwa dalam pemerintahan untuk pemeliharaan hubungan baik tidak hanya sekedar menyelenggarakan tugas-tugas, tetapi juga dalam memberikan pelayanan termaksud kepada masyarakat.¹⁶

Namun apabila ini dikaitkan dengan lembaga legislatif maka pimpinan legislatif sebagai wakil juru bicara masyarakat. Oleh karena itu lembaga legislatif mempunyai fungsi representasi, fungsi ini tidak kalah pentingnya dengan fungsi lembaga legislatif lainnya. Fungsi representasi ini mewajibkan seluruh anggota legislatif termaksud pimpinan untuk menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Selain itu fungsi representasi ini merupakan parameter pertanggungjawaban politik anggota legislatif terhadap masyarakat.¹⁷ Menurut Jimly Asshiddiqie perwakilan rakyat memiliki dua prinsip keterwakilan secara pemikiran atau aspirasi, dan keterwakilan secara fisik yang diwujudkan dengan terpilihnya seseorang wakil dalam keanggotaan parlemen.¹⁸

¹⁵Siagian, Sondang P, 2018, *Teori & Praktek Kepemimpinan*, Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 49.

¹⁶ Siagian, P Sondang, *Op. Cit.*, hlm 52.

¹⁷Asmawi, 2014, "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-Undangan Pemerintah Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah", *Jurnal Cita Hukum*. 1(1): 1-18

¹⁸ Efriza. 2014. *Studi Parlemen (Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia)*. Malang: Setara Press. hlm 27.

Fungsi representasi ini tentu juga berlaku terhadap semua lembaga legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah, termaksud DPRD Kota Pariaman. Di legislatif DPRD Kota Pariaman yang menjadi ketuanya adalah perempuan dan satu-satunya perempuan di DPRD Kota Pariaman. Meskipun satu-satunya perempuan di DPRD Kota Pariaman Fitri Nora dinilai mampu menyuarakan aspirasi masyarakat terutama masyarakat konstituennya.

Bagi masyarakat Fitri Nora merupakan sosok yang dekat masyarakat sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Fitri Nora meningkat. Hal ini bisa dilihat dari perolehan suara Fitri Nora dari periode ke periode selalu meningkat. Pada pemilu tahun 2014 Fitri Nora berhasil memperoleh suara tertinggi no 2 yaitu 1.142 suara. Sedangkan pada pemilu 2019 Fitri Nora berhasil memperoleh suara tertinggi no satu yaitu 1.187 suara. Hal ini juga didukung oleh pendapat salah satu masyarakat konstituen Fitri Nora, seperti salah satu pendapat masyarakat yaitu Dertha merupakan masyarakat Desa Sungai Pasak yang mengatakan grafik kepemimpinan Fitri Nora yang selalu meningkat.

Kemudian menurut Sondang P Siagian fungsi pimpinan sebagai wakil juru bicara, tidak terbatas pada pemeliharaan hubungan saja, tetapi harus membuahkan perolehan dukungan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.¹⁹ Untuk mengetahui kemampuan Fitri Nora dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil juru bicara masyarakat kepada pihak luar, maka dilakukan *polling* kepada 18 anggota DPRD Kota Pariaman berikut hasil *polling*:



Diagram 2
Aspirasi yang Sering Disuarakan Oleh Fitri Nora dan Pihak yang Diuntungkan dari Hasil Fitri Nora Membina Hubungan dengan Pihak Luar

Berdasarkan hasil wawancara dan *polling*, menunjukkan bahwa Fitri Nora mampu menjalankan fungsi kepemimpinannya sebagai wakil juru bicara masyarakat.

1. Kemampuan Kepemimpinan Perempuan dalam Berkomunikasi dengan Lembaga Eksekutif dan Masyarakat

Dalam lembaga politik seperti legislatif komunikasi merupakan hal penting. Menurut David K. Berlo komunikasi sebagai instrumen interaksi sosial berguna untuk mengetahui dan memprediksi sikap orang lain, juga untuk mengetahui keberadaan diri sendiri dalam

¹⁹ Siagian, P Sondang, *Op.Cit.*, hlm 54

menciptakan keseimbangan dengan masyarakat. Maka keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam mencapai yang diinginkan, ditentukan oleh kemampuan berkomunikasi. Oleh sebab itu pemimpin dituntut menjadi komunikator yang efektif, karena membangun hubungan baik kepada pihak luar tergantung kepada komunikasi tersebut efektif atau tidak. Komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang ingin disampaikan oleh sumber pesan tersebut diterima dan diartikan sama oleh sasaran komunikasi.

Fitri Nora sebagai Ketua DPRD Kota Pariaman, tentu sering berkomunikasi dengan pihak eksekutif. Mengingat legislatif yaitu DPRD Kota Pariaman dengan kepala daerah merupakan sama-sama penyelenggara pemerintahan daerah. Oleh karena itu penting bagi DPRD Kota Pariaman untuk saling berkomunikasi dengan pihak eksekutif. Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa komunikasi pihak eksekutif dengan DPRD Kota Pariaman khususnya dengan Fitri Nora sebagai Ketua DPRD Kota Pariaman berjalan dengan baik. Seperti yang diungkapkan Indra Syamsu sebagai Kabag Hukum dan HAM Walikota yang mengatakan:²⁰

“...Dari segi kemampuan Ibu Fitri Nora bagus, apalagi satu-satunya perempuan di DPRD Kota Pariaman, kalau Bapak memuji ya kan pengalaman dia banyak juga, dia netral orangnya. Dia memimpin masalah anggaran dia bagus. Apapun diundang ketua DPRD dengan pemerintah daerah tetap dia datang. Baik dengan Musrenbang, baik dengan masalah pisah sambut. Dia respon dan cepat tanggap, koordinasi kita baik dan cepat tanggap...”

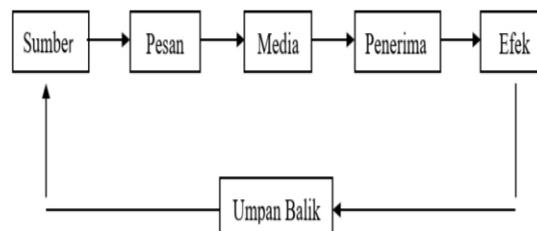
Fitri Nora sebagai Ketua DPRD Kota Pariaman, tidak hanya berkomunikasi dengan pihak eksekutif tetapi juga dengan masyarakat. Salah satu cara Fitri Nora berkomunikasi dengan masyarakat melalui radio lokal yaitu Radio Damai FM. Radio merupakan salah satu media yang bisa dikatakan efektif untuk menyampaikan informasi mengenai Kota Pariaman. Mengingat radio merupakan media yang masih digunakan masyarakat untuk mencari informasi terbaru terutama tingkat lokal. Fitri Nora menjadi narasumber di radio, tentu memberikan pengaruh bagi masyarakat Kota Pariaman yang mendengar yaitu menambah pengetahuan masyarakat tentang informasi Kota Pariaman, dan ide-ide untuk menyambut tahun baru 2021. Berikut bagan salah satu proses komunikasi Fitri Nora melalui radio dengan masyarakat.

²⁰ Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Indra Syamsu Kabag Hukum dan Ham di Kantor Balaikota Kota Pariaman, pada tanggal 22 Desember 2020.



Bagan 1
Proses Komunikasi Fitri Nora

Berdasarkan penjelasan di atas Fitri Nora telah memenuhi unsur-unsur dalam proses komunikasi yang terdiri dari, pertama sumber yang disebut juga sebagai komunikator. Kedua pesan yaitu sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima, isinya berupa informasi, nasihat, pengetahuan dan lain-lainnya. Ketiga media yaitu alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Pemilihan media merupakan suatu hal yang penting, agar pesan yang disampaikan tepat sasaran. Keempat penerima, pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. Kelima efek adanya tanggapan balik atau pengaruh dari penerima. Proses komunikasi yang dapat dilihat pada bagan 5.2 berikut:



Bagan 2
Proses Komunikasi Efektif

Agar pimpinan dapat disebut sebagai komunikator yang efektif, maka penting untuk mempertimbangkan jenis bahasa apa yang dipakai ketika berkomunikasi, karena bahasa memiliki fungsi penting. Menurut Keraf secara umum bahasa memiliki fungsi sebagai alat komunikasi, mengekspresikan diri, alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, dan alat kontrol sosial. Selain itu pemakaian jenis bahasa tepat berdasarkan situasi penting untuk diketahui,

seperti penggunaan jenis bahasa formal, semiformal, dan informal. Hal ini perlu untuk dipertimbangkan terutama bagi pimpinan legislatif.²¹

Fitri Nora sebagai Ketua DPRD Kota Pariaman, penting untuk mempertimbangkan jenis bahasa yang digunakan ketika berkomunikasi, karena Fitri Nora sebagai wakil juru bicara DPRD Kota Pariaman. Untuk mengetahui apakah Fitri Nora telah menggunakan jenis bahasa yang tepat ketika berkomunikasi, maka peneliti melakukan *polling*. *Polling* ini akan menunjukkan jenis bahasa apa yang digunakan Fitri Nora ketika berkomunikasi khusus kepada sektor formal. *Polling* dilakukan kepada 18 anggota DPRD Kota Pariaman. Berikut hasil *polling* yang peneliti lakukan:



Sumber: Data primer oleh peneliti

Diagram 3
Jenis Bahasa yang Digunakan Oleh Fitri Nora dalam Berkomunikasi dengan Lembaga Formal dan Jenis Bahasa yang Digunakan Oleh Fitri Nora dalam Berkomunikasi dengan Pihak Eksekutif/Lembaga/Instansi lainnya Menurut Responden

Hasil *polling* pertama menjelaskan bahwa menurut 18 anggota DPRD Kota Pariaman ketika Fitri Nora berkomunikasi kepada lembaga yang bersifat formal, maka Fitri Nora menggunakan jenis bahasa formal dengan angka 100%. Hasil *polling* juga menunjukkan bahwa menurut anggota DPRD Kota Pariaman jenis bahasa yang tepat digunakan saat berkomunikasi dengan lembaga formal yaitu jenis bahasa formal dengan angka 100%, hasil ini bisa dilihat *polling* kedua. Hal ini menunjukkan bahwa Fitri Nora dapat menggunakan jenis bahasa yang tepat ketika berhubungan dengan lembaga formal.

2. Kemampuan Kepemimpinan Perempuan sebagai Mediator dalam Penyelesaian Perbedaan Pendapat dalam Rapat

Menurut Sondang P Siagian, pembahasan fungsi pimpinan sebagai mediator difokuskan kepada penyelesaian konflik yang timbul dalam suatu lembaga atau timbul dalam hubungan di luar lembaga tersebut. Faktor penyebab konflik beragam, namun terdapat tiga faktor utama penyebab konflik yaitu, pertama, persepsi subjektif tentang kemungkinan terjadinya tantangan dari pihak luar lembaga. Kedua, kelangkaan sumber daya dan dana.

²¹Lamuddin, Finoza. 2009. *Komposisi Bahasa Indonesia*. Jakarta: Diksi Insan Mulia. hlm 3-5

Ketiga adanya asumsi bahwa dalam lembaga terdapat berbagai kepentingan yang sulit untuk diserasikan.²²

Jika melihat di DPRD Kota Pariaman, menurut Fitri Nora yang terjadi hanya berupa perbedaan pendapat ketika rapat. Perbedaan pendapat tersebut tidak pernah berujung kepada kekerasan fisik maupun merusak fasilitas. Meskipun yang terjadi hanya perbedaan pendapat, namun hal tersebut termaksud dalam konflik. Konflik menurut Hanson yaitu sebagai suatu interaksi yang dimanifestasikan dalam ketidakcocokan pendapat atau adanya perbedaan sesuatu di antara dua kesatuan sosial yang terdiri individu-individu, kelompok atau organisasi.²³

Agar mengetahui cara Fitri Nora menyelesaikan perbedaan pendapat saat rapat maka dilakukan *polling* kepada 18 orang anggota DPRD Kota Pariaman. Berdasarkan hasil *polling* yang dilakukan kepada 18 anggota DPRD Kota Pariaman, menunjukkan ketika terjadi perbedaan pendapat antara anggota DPRD Kota Pariaman cara yang sering digunakan oleh Fitri Nora adalah kompromi. Selain itu menurut 18 anggota DPRD Kota Pariaman cara kompromi yang dilakukan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat merupakan cara yang tepat, hal ini berdasarkan hasil *polling* yang dilakukan kepada 18 anggota DPRD Kota Pariaman. Berikut hasil *polling* dalam bentuk diagram.



Sumber: Data primer oleh peneliti
Diagram 4
 Cara yang Digunakan Oleh Fitri Nora dalam Menyelesaikan Perbedaan Pendapat Antara Anggota DPRD Cara yang Digunakan Fitri Nora dalam Menyelesaikan Perbedaan Pendapat Menurut Responden

Perbedaan pendapat dalam rapat khusus di legislatif merupakan suatu hal yang biasa terjadi termaksud di DPRD Kota Pariaman. Perbedaan pendapat di DPRD Kota Pariaman dapat diselesaikan oleh Fitri Nora dengan baik. Dalam penyelesaian perbedaan pendapat juga sudah diatur dalam tartib DPRD Kota Pariaman bagaimana cara mengambil keputusan pada saat rapat.

3. Kemampuan Kepemimpinan Perempuan sebagai Integrator dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD)

²² Siagian P. Sondang, *Op.Cit.*, hlm 59

²³ Pusalong, Harbani, *Op.Cit.*, hlm 172-173

Dalam suatu lembaga terdapat spesialisasi peran yang berbeda-beda, maka perlunya integrator. Menurut Sondang P Siagian pimpinan yang berperan sebagai integrator, karena dalam suatu lembaga terdapat adanya pembagian tugas, sistem alokasi daya, dana dan tenaga, serta diperlukan spesialisasi pengetahuan dan keterampilan yang dapat menimbulkan perilaku yang berkotak-kotak, disinilah peran pimpinan sebagai integrator. Spesialisasi peran juga terdapat dalam lembaga legislatif seperti di DPRD Kota Pariaman yang dikenal dengan alat kelengkapan dewan (AKD) yang terdiri dari:

- Pimpinan DPRD
- Badan Musyawarah (Bamus)
- Komisi(terdiri dari tiga komisi)
- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)
- Badan Anggaran (Banggar)
- Badan Kehormatan (BK)

Dalam DPRD yang berfungsi sebagai interagrator yaitu pimpinan DPRD. Fungsi pimpinan DPRD sebagai integrator ini sesuai dengan kewenangan pimpinan DPRD Kota Pariaman. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota menjelaskan bahwa pimpinan DPRD memiliki kewenangan melakukan koordinasi dalam upaya mengnyinergikan pelaksanaan agenda dan materi dari kegiatan alat kelengkapan dewan. Disini pimpinan harus bisa bersinergi dengan anggota lainnya. Menurut *The New Brolier Webster International Dictionary*, sinergi yaitu satu kerja kelompok yang memberikan hasil efektif dari pada kerja perorangan.²⁴

Apabila dikaitkan dengan DPRD Kota Pariaman yang memiliki alat kelengkapan dewan dengan fungsi berbeda-beda, namun harus saling berkoordinasi. Maka Fitri Nora sebagai Ketua DPRD Kota Pariaman berperan penting untuk mengkoordinasikan semua alat kelengkapan dewan agar dapat bekerja sesuai dengan fungsinya.

Fitri Nora dinilai bisa menjadi integrator bagi AKD di DPRD Kota Pariaman sehingga fungsi legislatif sebagai legislator, anggaran dan pengawasan dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan pernyataan dari beberapa informan menyatakan bahwa Fitri Nora mampu menjalankan fungsinya sebagai integrator, hal ini juga didukung oleh pernyataan Genius sebagai Walikota Pariaman yang mengatakan:²⁵

“...Fitri Nora bisa dibilang mampu, ini bisa dilihat outputnya, ketika dia bisa menghasilkan fungsi legislator menghasilkan perda berarti dia mampu, dan kemudian mampu menjalin komunikasi dengan keharmonisan legislatif dan

²⁴Asep Suryana. “Kepemimpinan dan Manajemen Pendidikan Dasa”. *MPDR5301/Modul 1*. Hlm 1.14

²⁵Wawancara peneliti dengan Genius sebagai Walikota Pariaman (Triangulasi) di Pendopo Walikota Pariaman pada tanggal 5 Maret 2021.

eksekutif berarti dia mampu. Mampu menggerakkan seluruh AKD, berarti dia mampu, AKD menurut saya bekerja dan cepat tanggap...”

Berdasarkan pernyataan dari Genius menjelaskan bahwa Fitri Nora bisa dikatakan mampu menjalankan fungsinya sebagai Ketua DPRD Kota Pariaman, salah satunya sebagai integrator yaitu menggerakkan AKD di DPRD Kota Pariaman agar berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. AKD di DPRD Kota Pariaman menurut Genius termaksud bekerja dan tanggap.

Faktor yang Memengaruhi Kepemimpinan Perempuan dalam Lembaga Legislatif

Menurut Hersey dan Blanchard terdapat 3 faktor yang memengaruhi kepemimpinan yaitu pertama kemampuan pemimpin itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari pengalaman pemimpin tersebut maupun tingkat pendidikan. Kedua, pengikut atau bawahan. Ketika bawahan memiliki pengalaman tentu ini akan berdampak baik terhadap lembaga. Ketiga, situasi atau lingkungan, maksudnya apabila situasi maupun lingkungan baik secara fisik maupun sosial mendukung maka ini akan berdampak baik terhadap lembaga²⁶

Apabila ini dikaitkan dengan Fitri Nora, maka pengalaman yang dimiliki oleh Fitri Nora berperan besar dalam kemampuan Fitri Nora menjalankan fungsi kepemimpinannya. Sebelum Fitri Nora terjun dalam dunia politik, Fitri memiliki pengalaman dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti pendiri LSM Limpapeh dan pendiri Lembaga Perkumpulan Padusi Kota Pariaman. Berasal dari LSM membuat Fitri Nora dekat dengan masyarakat. Pada tahun 2006-2015 Fitri Nora merupakan Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pariaman (P2TP2A). Sedangkan awal mula masuk politik Fitri Nora berawal dari tahun 2008 dengan bergabung Partai GERINDRA. Pada pemilu legislatif (pileg) tahun 2014 Fitri Nora berhasil mendapatkan kursi di DPRD Kota Pariaman, dan pada tahun 2018 menjadi wakil DPRD Kota Pariaman.

Faktor yang memengaruhi kepemimpinan selanjutnya adalah bawahan. Dalam suatu lembaga, bawahan memiliki peranan penting bagi kesuksesan suatu organisasi, ketika bawahan memiliki pengalaman, dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik, tentu tujuan dari lembaga tersebut dapat tercapai dengan cepat.²⁷Namun dalam lembaga legislatif seperti di DPRD Kota Pariaman tentu berbeda dengan lembaga lainnya, karena bersifat kolektif kolegial dalam mengambil keputusan tidak bisa pimpinan mengambil keputusan secara sendiri tanpa melibatkan anggota lainnya. Selain itu salah satu kesulitan bagi seseorang pimpinan adalah beradaptasi, bahkan adaptasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama.

²⁶Enceng, & Aslichati. “Konsep Dasar Kepemimpinan”. *ADPU4334/Modul 1*.

²⁷UPN Jatim. Kepemimpinan. http://eprints.upnjatim.ac.id/2539/5/Kepemimpinani_Baru.pdf. (diakses tanggal 4 Mei 2021)

Penting bagi pimpinan untuk beradaptasi, agar tujuan suatu lembaga dapat tercapai dengan lancar dan cepat. Terkhusus di lembaga legislatif saling mengenal karakter di legislatif penting, karena ini akan memudahkan berkomunikasi sehingga keputusan dapat cepat diambil.

Namun bagi Fitri Nora anggota DPRD Kota Pariaman sudah bagaikan keluarga. Hal ini dikarenakan Fitri Nora dengan anggota DPRD Kota Pariaman pada periode ini sudah saling mengenal, karena terdapat 12 orang merupakan *incumbent* dari periode sebelumnya. Namun berdasarkan penelusuran peneliti terdapat 14 orang yang sudah memiliki pengalaman yang lama di legislatif pada periode tertentu. Bekerja di bidang yang sudah pernah ditekuni tentu akan memudahkan beradaptasi, dan memudahkan proses mengintegrasikan, karena mereka sudah mengetahui tugas-tugas di bidang tersebut, tanpa harus memerlukan waktu untuk mempelajari semuanya dari nol sehingga ini akan mempercepat untuk mencapai suatu tujuan.

Faktor selanjutnya yang memengaruhi kepemimpinan Fitri Nora sehingga Fitri Nora mampu menjalankan fungsi kepemimpinannya adalah adalah situasi. Maksudnya bentuk keadaan yang ditimbulkan oleh lingkungan yang dimiliki dan dihadapi oleh lembaga yang dipimpin, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Faktor pendukung Fitri Nora dapat menjalankan fungsinya tidak hanya dari segi faktor pemimpin dan bawahan saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor situasi yang dihadapi Fitri Nora baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik.

4. KESIMPULAN

Penulisan ini menjelaskan bahwa perempuan memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsi kepemimpinan khususnya dalam lembaga legislatif, seperti Fitri Nora sebagai Ketua DPRD Kota Pariaman dan satu-satunya perempuan di DPRD Kota Pariaman. Fitri Nora dinilai memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsi kepemimpinan, namun kemampuan Fitri Nora menjalankan fungsi kepemimpinan ini dipengaruhi beberapa faktor.

Faktor yang memengaruhi kemampuan perempuan dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya yaitu pertama, kemampuan pimpinan itu sendiri yang dilatarbelakangi oleh pengalaman, tingkat pendidikan dan lain-lainya. Kedua, kemampuan bawahan atau pengikut. Ketiga, situasi maksudnya yaitu keadaan yang dihadapi oleh pimpinan tersebut, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.

Keberadaan *affirmative action* bertujuan untuk mendorong peningkatan jumlah perempuan di dalam legislatif. Kebijakan ini tentu seharusnya di dukung oleh masyarakat dengan cara memberikan kepercayaan kepada perempuan bahwa perempuan memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsi kepemimpinan. Selain itu perempuan harus membekali diri agar memiliki kemampuan dalam kepemimpinan tentu dalam ini hal ini partai

politik memiliki peran besar dalam membina jiwa kepemimpinan perempuan sebagai kader partai.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawi, 2014, "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-Undangan Pemerintah Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah", *Jurnal Cita Hukum*, 1(1): 1-18.
- Budiatri, Aisah Putri, 2011, "Bayang-Bayang Afiriasi Keterwakilan Politik Perempuan di Parlemen Indonesia", *Jurnal Studi Politik Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia*, 1(2):97-113.
- Efriza, 2014, *Studi Parlemen (Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia)*, Malang: Setara Press.
- Eagly, A.H., & Carli, L.L., 2003, "The Female Leadership advantage: An Evaluation of the evidence", *Leadership Quarterly*, 14, 807-834
- Enceng, dan Lilik Aslichati, "Konsep Dasar Kepemimpinan", ADPU4334/Modul 1.
- Fitriani, Annisa, 2015, "Gaya Kepemimpinan Perempuan", *Jurnal Tapis*, 11(2): 1-24.
- Holilah, 2014, "Fungsi dan Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan di Desa Masaran Banyuwates Sampang", *Jurnal Review Politik*, 4(1): 119-132.
- Kanter, R, 1977, "Men and Women Of The Corporation", New York: Basic Book.
- Lamuddin, Finoza, 2009, *Komposisi Bahasa Indonesia*, Jakarta: Diksi Insan Mulia.
- Mustamin, 2016, "Studi Konflik Sosial di Desa Bugis dan Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2014", *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 2(2): 185-205.
- Ruzikna, Marfuah, 2015, "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis Terhadap Loyalitas Karyawan", *JOM FISIP*, 2(2): 1-15.
- North Peter G., 2018, *Kepemimpinan (Teori dan Praktik)*, Jakarta: PT Indeks.
- Pasalong, Harbani, 2008, *Kepemimpinan Birokrasi*, Bandung: Alfabeta.
- Sugirto, R Haris Permana, 2019, "Gaya Kepemimpinan Politik Elly Thrisdayanti Ketua DPRD Kota Padang", Skripsi. Padang: FISIP Universitas Andalas
- Siagian, Sondang P., 2018, *Teori & Praktek Kepemimpinan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Subowo, Ajib, 2017, "Kepemimpinan Politik Nurdin Abdullah di Kabupaten Banteng", Skripsi, Makassar: FISIP Universitas Hasanuddin .
- Suryana, Asep, "Kepemimpinan dan Manajemen Pendidikan Dasar", MPDR5301/Modul 1.
- Suheri, Harahap, 2018, "Konflik Etnis dan Agama di Indonesia", <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/JISA/article/view/5096> (diakses 4 Mei 2021)
- Syahputri, 2014, "Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Komparasi Indonesia dan Korea Selatan", *Indonesian Journal of International Studies (IJIS)*, 1(2): 165-176.
- UPN Jatim, "Kepemimpinan", [http://eprints.upnjatim.ac.id/2539/5/Kepemimpinani Baru.Pdf](http://eprints.upnjatim.ac.id/2539/5/Kepemimpinani_Baru.Pdf). (diakses tanggal 4 Mei 2021)

Winarmi,2011,“Kepemimpinan”,<http://staffnew.uny.ac.id/upload/131655982/pendidikan/modul-kepemimpinan-iv.pdf>. (diakses 4 Mei 2021)